

Bersama Memacu Ekonomi

Modal besar, aset jumbo membuat sebagian kalangan khawatir Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuat swasta dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpinggirkan. Belum lagi dukungan kuat dari Presiden Prabowo Subianto.

Kita tahu, Danantara memegang tujuh BUMN dengan aset sekitar US\$ 900 miliar, yakni PT Pertamina, MIND ID, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

Ketujuh BUMN ini pada 2024 menyeter dividen US\$ 5,2 miliar ke kas negara, mewakili 95% dari total dividen BUMN. Dalam amandemen UU BUMN, dividen tujuh BUMN akan masuk ke Danantara untuk diinvestasikan, bukan ke kas negara.

Tak hanya itu, Danantara dibekali modal US\$ 20 miliar hasil efisiensi anggaran tahun ini. Pada 2025, Danantara berniat merilis 15-20 proyek baru. Tahun depan, dana sebesar itu disebut juga bakal masuk ke Danantara untuk diputar.

Sementara itu, swasta kini dihadapkan pada berbagai macam tantangan, antara lain suku bunga bank yang masih tinggi. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan pinjaman untuk berekspansi.

Apalagi UMKM, di mana banyak yang belum

“Danantara bukanlah ancaman bagi swasta, apalagi UMKM. Sebaliknya, terbuka peluang bagi mereka untuk berkolaborasi dengan Danantara untuk menggarap sejumlah proyek yang pada ujungnya dapat membantu akselerasi ekonomi Indonesia,

sektor swasta dan UMKM, Danantara bisa mendorong perekonomian nasional ke depan. Apalagi, sebenarnya, petinggi Danantara tadinya merupakan profesional sekaligus pengusaha yang sangat mengerti kekhawatiran tersebut.

CEO Rosan Perkasa Roeslani, COO Dony Oskaria, dan Pandu Sjahrir merupakan sosok pejabat di pemerintahan yang punya latar belakang juga merupakan pengusaha dari sektor swasta

Pada prinsipnya, target mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2024-2029 merupakan tugas bersama antara pemerintah dan seluruh pihak. Oleh karena itu, Danantara mengajak sektor swasta untuk menjadi bagian dari mitra pemerintah dalam menggenjot kinerja perekonomian dalam negeri.

Bahkan, ke depan, pemerintah berencana menggunakan skema *co-investment* dengan menggandeng investasi asing maupun swasta untuk mengerek modal kerja Danantara menjadi US\$ 40 miliar per tahun. Lewat skema ini, pemerintah percaya bisa menggandakannya hingga empat kali lipat.

Jadi, Danantara bukanlah ancaman bagi swasta, apalagi UMKM. Sebaliknya, terbuka peluang bagi mereka untuk berkolaborasi dengan Danantara untuk menggarap sejumlah proyek yang pada ujungnya dapat membantu akselerasi ekonomi Indonesia. □

— POJOK IDE —

BPOM temukan 61 obat bahan alam mengandung bahan kimia obat.

'Demam' oplosan.

Kemkomdigi siagakan patroli siber guna analisis potensi konten negatif.

Perkuat perlindungan anak di ruang digital.



— DAILY QUOTE —

Semoga sosok-sosok (investor) seperti Ray Dalio dan Bridgewater Associates dapat bergabung (dengan BPI Danantara). Gagasannya, mengundang banyak investor bekerja sama dalam berinvestasi pada proyek-proyek yang layak.

Hashim Sujono Djojohadikusumo, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi RI.

Ekonomi Biru, Industrialisasi dan Militerisme Kelautan

Ekonomi biru (EB) yang menghegemoni paradigma pembangunan kelautan dewasa ini menimbulkan polemik secara global. Riset terbaru menyebut EB hanya sebagai “kedok” industrialisasi (komodifikasi & monetisasi) dan militerisme kelautan (Wolfenden & Penjueli, 2023).



Oleh: Muhamad Karim *)

Praktik EB juga memicu “ketidakadilan sosial ekonomi” akibat skema pembiayaannya lebih berorientasi kepada kepentingan bisnis dan energi terbarukan. Jauh panggang dari api menyjahterakan keluarga nelayan dan masyarakat pesisir (Blythe et al, 2023).

Sayangnya, Indonesia memosisikan EB tak ubahnya “ideologi” pembangunan baru. Pun diklaim bakal melestarikan sumber daya kelautan dan ekosistemnya hingga mencegah dampak perubahan iklim. Suatu preposisi menyesatkan karena dibangun tanpa kritis dan dialektika pemikiran, termasuk di Indonesia tat kala memproduksi kebijakan kelautan.

Polemik

Semenjak digaungkan tahun 2012 di forum PBB, EB menuai beragam polemik secara paradigmatis, konseptual hingga praktisnya. *Pertama*, EB dianggap sebagai “kedok” pembangunan industri dan militerisme kelautan. Ditandai: (i) pembiayaan infrastruktur dalam skema EB buat membangun pelabuhan perairan dalam (*deep-water ports*) yang bertujuan mengamankan dan mendekatkan akses ke sumber daya kelautan serta menempatkan posisi bangunannya aman, tersedia alur pelayaran dan ruang bagi kapal-kapal militer.

Kemudian, (ii) mengampayekan pertambangan laut dalam (*deep-sea mining*) (pasir laut) sebagai penyelamatan bagi transisi energi masa depan yang ramah iklim. Kenyataannya malah berdampak terhadap perubahan iklim, mendegradasi keanekaragaman hayati, dan merusak ekosistem laut. Pasalnya, pertambangan kerap disertai perampasan lahan. Proses pengolahannya (hilirisasi) juga melibatkan oknum aparat keamanan dan militer kerap membekingnya.

Selain itu, (iii) Perjanjian Subsidi Perikanan pada Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade*

Organization's Agreement on Fisheries Subsidies), gagal mengatasi penghambat keberlanjutan sumber daya perikanan. Malah membiarkan para pihak yang bertanggung jawab terhadap penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) dan melampaui kapasitasnya (*overcapacity off the hook*), akibat penggunaan trawl dasar.

Poin lainnya, (iv) Perjanjian PBB soal Keanekaragaman Hayati pada Areal di luar Yurisdiksi Nasional (*UN Agreement on Biodiversity in areas Beyond National Jurisdiction*) yang akan diadopsi berbagai negara akan menjadi instrumen tata kelola kelautan (*tool of ocean governance*) yang para pihak yang paling mengeksploitasi lautan.

Temuan riset menegaskan bahwa EB bukan obat mujarab mewujudkan pembangunan kelautan yang adil, dan berkelanjutan. Pun jauh panggang dari api menyjahterakan rakyat.

Kedua, Blythe et al. (2023) menemukan ragam “ketidakadilan sosial” akibat praktik EB yaitu: (i) ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Kebijakan dan inisiatif berorientasi pertumbuhan biru (*blue growth*) cenderung memberikan manfaat ekonominya pada orang kaya dan berkuasa. Sebaliknya, penduduk miskin terpinggirkan.

‘Ketidakadilan sosial’ lainnya adalah (ii) pengusiran nelayan skala kecil (NSK) dan masyarakat adat secara spasial dari habitat dan permukimannya. Dampaknya, mengancam keberlanjutan perikanan lokal dan menciptakan persaingan yang tidak adil dengan armada perikanan industri.

Selain itu, (iii) terjadinya kekerasan dan perbudakan dalam industri perikanan akibat pekerjaannya memiliki tingkat kerentanan tinggi. Mereka dieksploitasi mirip perbudakan, termasuk anak-anak dan pekerja migran. Yang tak kalah penting, (iv) ketidakadilan akibat paparan limbah berbahaya dan polusi toksik. Ini dialami komunitas pribumi, dan kelompok sosial, politik, dan ekonomi yang teralienasi.

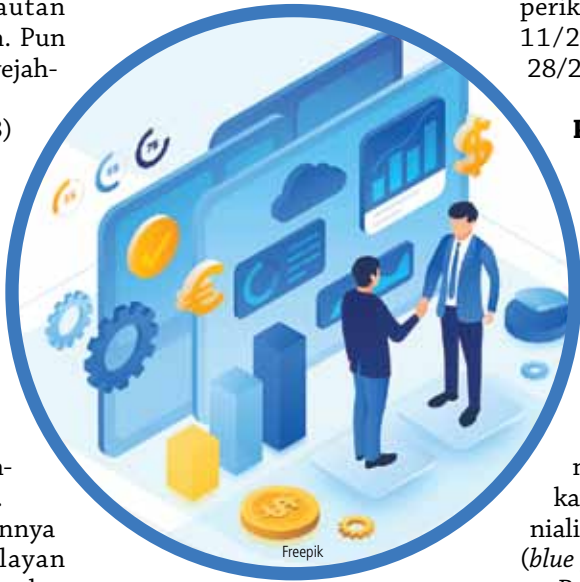
Ketiga, implementasi keuangan biru dan surat utang biru. Praktik di Eropa dan Asia Tengah lebih berorientasi industri skala besar (Schutter et al, 2024). Industri kecil, menengah dan koperasi terabaikan.

kan. Akibatnya, alokasi pembiayaan EB menciptakan “kesenjangan pendanaan” dan sulit mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penyebabnya adalah kurangnya transparansi penyaluran keuangan lewat skema utang biru. Imbasnya, EB berisiko dikooptasi buat memfasilitasi eksploitasi ruang dan sumber daya laut dan gagal menjamin kelestarian lingkungan serta keadilan sosial.

Schutter et al (2024), menemukan bahwa sebagian besar aliran uang berlabelkan skema utang biru yang tersalurkan di Eropa dan Asia Tengah sepanjang 2017-2021. Ironisnya, cenderung mengkomodifikasi kepentingan industri, bisnis dan energi terbarukan.

Inilah “tanda bahaya” pemucikan ketidakadilan



produksi ketidakserataan gender? Ternyata, pekerja industri kelautan dan kemaritimannya didominasi laki-laki. Imbasnya, terjadi kesenjangan upah dan kurangnya keterwakilan perempuan sebagai manajer berkedudukan tinggi di perusahaannya (Ekstedt et al 2025).

Bagaimana di Indonesia? Beragam kebijakan berlabel EB malah bersifat polemik dan berorientasi institusi ekstraktif. Faktanya: (i) membolehkan mengubah kawasan konservasi laut menjadi pemanfaatan (PP No 27/2021); (ii) eksploitasi pasir laut (PP No 26/2023 dan Permen KKP No 33/2023); (iii) penambangan di pulau kecil (Wawonii dan Sangihe); dan (iv) penangkapan ikan terukur alias privatisasi wilayah pengelolaan perikanan berbasis kuota (PP No 11/2023 dan Permen KKP No 28/2023).

Perubahan Paradigma

Ragam kebijakan kelautan, pesisir dan pulau kecil yang diproduksi pemerintah tak luput dari kedudukan EB sebagai paradigmanya. Makanya, perubahan paradigma dan reformasi kelembagaan dalam tata kelola kelautan sebagai keniscayaan. Pasalnya, EB adalah metamorfosis kapitalisme neoliberal dan kolonialisme baru berbasis utang biru (*blue finance*).

Berbagai ahli menyebutnya sebagai “perampasan biru” (*blue grabbing*), kolonialisme biru (*blue colonialism*), ekstraktivisme sumberdaya laut hingga kejahatan biru (*blue crime*). Imbasnya, melahirkan antitesis EB: (i) *degrowth* biru (*blue degrowth*); (iii) keadilan biru (*blue justice*) bagi perikanan skala kecil, (ii) regeneratif ekonomi kelautan (*ocean economics regenerative*), (iii) ekonomi donat (*doughnut economics*), dan ekonomi Nusantara (Nusantaronomics) berbasis kewirausahaan etnik, ekonomi lokal berkebudayaan dan sumberdaya alam kepulauan.

Kini, tinggal pemerintah mau memilih yang mana buat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat tanpa industrialisasi eksploitatif-ekstraktif dan militerisme kelautan.

*) Dosen Universitas Trilogi/ Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.



Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyivita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambagyo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, **Direktur Utama:** Rio Abdurachman Podungge, **Wakil Direktur Utama:** Apreyivita Dyah Wulansari, **Direktur Keuangan & Umum:** Tania Kirana, **Direktur Komersial:** Melly Marlani, **Direktur Legal:** Patricia Tambunan

BOARD OF MANAGEMENT

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (*online*). **Wakil Redaktur Pelaksana:** Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (*online*), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (*online*), Kunradus Aliand, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (*online*). **Reporter:** Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. **Sekretariat Redaksi:** Suryani Belsyda. **Produksi:** Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. **Desain Grafis:** Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warih (General Manager). **Marcomm & Event Management:** Lucky Sukmawati (Manager), **Circulation:** Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#B5 - K 1, #K2.1 Jl Ojita, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510, Redaksi/ Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek. sirkulasi: BCA 441.588888.1 Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPU dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Rek. Iklan: CIMB Niaga 8001.8575.8200 Cab. Gatot Subroto Jakarta (collection), Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.